



Adi Wahyono¹
 Sony Juniarti²
 Nur Astapia³

ANALISIS OPTIMALISASI KESEJAHTERAAN DAN JAMINAN SOSIAL BAGI PETUGAS KEBERSIHAN DI KABUPATEN PURWOREJO SEBAGAI GARDA TERDEPAN KEBERSIHAN LINGKUNGAN DAN JALAN RAYA

Abstrak

Pemenuhan hak dan kewajiban bagi petugas kebersihan di Kabupaten Purworejo perlu diadakan peningkatan yang masif agar dalam bekerja memiliki semangat dan dedikasi yang tinggi karena telah dipenuhinya apa yang menjadi hak bagi pekerja tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan secara empiris yakni menguraikan permasalahan yang ada kemudian menambahkan data primer serta sekunder yang didapatkan dari sumber resmi dinas terkait, selain itu memakai referensi yang sesuai dengan makalah yang dibuat ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan sampah yang ada di Purworejo sudah efisien dan kebersihan terjaga dari adanya pengaturan pengelolaan sampah yang dipilih sesuai dengan jenisnya. Maka upaya yang sudah dijalankan terus dikembangkan agar kinerja semua pihak di dinas lingkungan hidup terus menunjukkan peningkatan yang berkelanjutan. Kesehatan menjadi faktor penentu petugas kebersihan dalam melakukan kerjanya, jadi hal itu perlu diperhatikan oleh dinas lingkungan hidup dan perikanan yang menaungi mereka. Jika keseluruhan prosedur dan peraturan perundang-undangan sudah dijalankan dengan benar, membuat komponen tersebut bisa membawa perubahan yang bagus terhadap kesejahteraan dan jaminan sosial. Selain itu upaya masyarakat yang sudah membantu menjaga kebersihan sampah yang dihasilkan bisa diapresiasi secara penuh. Memenuhi hak dan kewajiban bagi pekerja memang membutuhkan upaya yang konsisten antara tindakan dengan mengaitkan pada aturan yang berlaku di dalamnya sebagai penentu arah kebijakan hukum.

Kata Kunci: Pekerja, Jaminan Sosial, Hak Dan Kewajiban Pekerja

Abstract

Fulfilling the rights and obligations of cleaning workers in Purworejo Regency needs to be massively increased so that they have high enthusiasm and dedication at work because they have fulfilled the rights of these workers. This research uses an empirical approach, namely describing the existing problems and then adding primary and secondary data obtained from official sources from the relevant agencies, in addition to using references that are appropriate to this paper. The results of the research show that waste management in Purworejo is efficient and cleanliness is maintained due to waste management arrangements chosen according to the type. So the efforts that have been carried out continue to be developed so that the performance of all parties in the environmental service continues to show continuous improvement. Health is a determining factor for cleaners in carrying out their work, so this needs to be paid attention to by the environmental and fisheries services that oversee them. If all procedures and legal regulations have been implemented correctly, making these components can bring good changes to welfare and social security. Apart from that, the community's efforts to help maintain the cleanliness of the waste produced can be fully appreciated. Fulfilling the rights and obligations of workers requires consistent efforts between actions and linking them to the applicable regulations as a determinant of the direction of legal policy.

Keywords: Workers, Social Security, Workers Rights And Obligations

^{1,2,3}Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Tidar
 email: wahyoadi0122@gmail.com, sonyjunia08@gmail.com, astapia12@gmail.com

PENDAHULUAN

Pemenuhan hak dan kewajiban bagi petugas kebersihan di Kabupaten Purworejo perlu diadakan peningkatan yang masif agar dalam bekerja memiliki semangat dan dedikasi yang tinggi karena telah dipenuhinya apa yang menjadi hak bagi pekerja tersebut. Telah diatur dalam Undang-Undang tentang ketenagakerjaan yakni UU No.13 tahun 2003. Di dalam hal ini peranan serta dari Dinas Lingkungan Hidup dan Perikanan sebagai lembaga yang mengawasi dan juga mengelola para petugas kebersihan. Sehingga dengan ditingkatkan pada semua bidang terkait penanganan kebersihan di purworejo dapat dikaji lebih mendalam lagi serta memperoleh penghargaan atas kinerja semua pegawai di DLHP Purworejo. Terkait dengan aturan yang baru di dalam Undang-Undang cipta kerja terdapat perbedaan dalam hal pemberian upah kepada pekerja yang mana harus menyesuaikan daerah provinsi supaya ditinjau pemberian gajinya. Kabupaten harus mengikuti peraturan di tingkat provinsi dan pemerintah pusat agar tidak membuat kebijakan sendiri dalam menjalankan pemerintahan. Petugas kebersihan bekerja sama dengan pengangkut sampah yang akan dibuang menuju tempat pembuangan akhir atau TPA yang ada di Desa Jetis, Kecamatan Loano, hal itu menunjukkan jumlah sampah yang mengalami peningkatan serta berasal juga dari kegiatan rumah tangga. Namun di satu sisi ada manfaat yang dapat dijadikan tambahan penghasilan dengan cara memisahkan jenis sampah terutama non-organik yang bisa dijual kembali ke pengumpul sampah bisa didaur ulang kembali.

Kesejahteraan dan pemerataan hak-hak pekerja dapat dijelaskan secara luas serta memiliki perbedaan dengan individu yang satu dengan yang lain. Masyarakat yang memilih bekerja menjadi petugas kebersihan bukan pilihan utama, tetapi dorongan kebutuhan yang pasti membutuhkan uang untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari akhirnya memilih pekerjaan ini. Persaingan kerja dan syarat kerja yang semakin tinggi sebagai alasan utama mempertahankan pekerjaan yang sedang dijalani agar tetap mendapatkan penghasilan yang pasti. Pengelolaan sampah juga harus ditangani dengan benar, misalnya muncul inovasi terbaru dari pemerintahan kabupaten Purworejo mengolah sampah menjadi paving block ramah lingkungan dan membudidayakan maggot (hewan pengurai sampah atau pemakan sampah). Kemudian gagasan baru tersebut dapat dijalankan dengan telaten dan konsisten agar memperoleh hasil yang maksimal. Kegiatan yang setiap hari dilakukan para petugas kebersihan yakni memulai membersihkan bagian dari masing-masing tempat yang sudah dibagi oleh DLHP Purworejo, selanjutnya ada petugas kebersihan juga yang bertugas mengangkut sampah dan membuangnya di tempat pembuangan akhir sampah menggunakan truk sampah. Masalah kebijakan penanganan sampah sangat kompleks karena terdapat unsur positif dan negatif yang dirasakan oleh masyarakat umum.

Menyamakan kebutuhan yang ada dengan tujuan untuk meningkatkan kinerja dan tingkat kebersihan lingkungan sangatlah dinanti-nanti karena jika ada tindakan yang nyata dari pemerintah kabupaten bisa menunjang sarana dan prasarana yang ada. Maka terciptanya keindahan dan keasrian di seluruh area yang menjadi titik dijaga kebersihan tempat dan lingkungannya. Kemandirian dan kesejahteraan menjadi penentu terwujudnya keberadaan jaminan sosial serta upaya pengurangan sampah melalui gerakan masyarakat peduli sampah dan juga tempat tinggal sehari-hari. Kesejahteraan diterapkan secara universal untuk seluruh manusia dan sangat diharapkan di dalam keluarga, sebagai orang tua pasti diharapkan tentang jaminan dan kesejahteraan dalam mencukupi kebutuhan sehari-hari. Tanggung jawab atas pekerjaan petugas kebersihan bisa saling menghormati dan dihargai dari pekerjaan mereka atas keterkaitan antara adab dan juga etika yang memiliki perbedaan penerapan, isi, dan pemahaman masing-masing orang. Ada faktor internal dan eksternal yang berkesinambungan setelah dijelaskan dari uraian di atas, mencakup peranan sosial serta bagian dari lembaga yang berwenang mengatasi permasalahan lingkungan dan pekerja.

Tujuan memuat pertanyaan artikel yang harus di jelaskan pada pembahasan dan di jawab pada kesimpulan.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan secara yuridis empiris yakni menguraikan permasalahan yang ada kemudian menambahkan data primer serta sekunder yang didapatkan dari sumber resmi dinas terkait, selain itu memakai referensi yang sesuai dengan makalah yang dibuat ini. Baik itu melalui jurnal, artikel ilmiah maupun buku-buku. Sumber Undang-Undang

yang masih berlaku mengenai ketenagakerjaan dan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo sebagai penguat data dalam makalah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Peran Aktif Dari Dinas Lingkungan Hidup Dan Perikanan Di Purworejo Dalam Membantu Memberikan Pelayanan Kesehatan Gratis Untuk Pekerja Agar Pekerja Bekerja Dalam Kondisi Prima Setiap Harinya

Jika dilihat dari faktor cuaca dan keadaan lingkungan tempat petugas kebersihan bekerja maka harus ada pencegahan yang tertuju langsung dengan hambatan yang ada tersebut. Sehingga pekerjaan yang dilakukan dapat berjalan dengan efisien dan menghasilkan kebersihan tata kelola lingkungan menjadi terarah. Hal itu mendorong Kabupaten Purworejo mendapatkan penghargaan piala Adipura tahun 2023 sebagai kategori Kota Kecil, penyerahan diberikan langsung dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia kepada Bupati Purworejo Ibu Hj. Yuli Hastuti tanggal 5 Maret 2024 di Jakarta. Bentuk apresiasi dan penghargaan diucapkan kepada semua pihak Dinas Lingkungan Hidup dan juga garda utama yaitu para petugas kebersihan yang telah bekerja dengan kinerja yang tinggi hingga mendapatkan penghargaan. Terkait adanya kendala dalam mengatasi penumpukan sampah saat musim hujan dengan menyiagakan dan mengoptimalkan tempat pengumpulan sampah di beberapa titik yang telah disediakan pemerintah dan juga mengatur tempat pembuangan ampah akhir yang ada di Desa Jetis, purworejo. Solusi yang dapat diberikan dari pemerintah kabupaten yakni dengan membuat tempat penampungan sampah yang bisa dibuat di tiap-tiap desa ataupun kelurahan yang mana hal itu dimulai dari lingkup kecil daerah kabupaten, dan bisa membantu upaya penyelesaian masalah sampah kegiatan rumah tangga dan lain-lain.

Penunjang kerja yang dibutuhkan pekerja selain dari alat kerja juga terkait kesehatan yang harus diperhatikan oleh dinas terkait. Adanya pelayanan yang memadai dari pemangku kepentingan sangat mempengaruhi kebijakan pertumbuhan dari kinerja setiap pekerja kebersihan. Makna yang sangat mendalam digambarkan dari keseimbangan antara kesejahteraan dan mendapatkan hak-hak yang sesuai. Aturan yang mengatur mengenai kesejahteraan dan jaminan sosial juga telah memberikan gambaran jelas bahwa sistem pemerintahan yang baik itu harus memberikan pemenuhan yang dikoordinatori pemerintahan pusat, baik itu dalam pemberian alat-alat untuk melaksanakan kerja, sarana dan prasarana, pemberian gaji yang sesuai dengan upah minimum kabupaten/kota. Dari gambaran tersebut telah dijelaskan betapa pentingnya akan pemberian pelayanan kesehatan yang bisa didapatkan secara gratis demi terselenggaranya pencapaian target tahunan dinas kebersihan. Membuat program kesehatan bagi petugas kebersihan sebelum kerja menjadi nilai positif dari para pegawai dinas kebersihan lingkungan dan perikanan yang mampu mengupayakan itu, setelah kegiatan itu bisa berjalan masalah-masalah yang tadinya ada menjadi berkurang dengan manfaat yang diperoleh setiap individu.

Kesehatan adalah faktor utama dan penting untuk semua orang karena jika sehat maka dalam menjalankan setiap kegiatan yang ada mampu terselesaikan dengan cepat dan benar. Sehingga peranan aktif dari lembaga terkait dibutuhkan dan diharapkan oleh pekerja kebersihan, agar lebih giat bekerja dan dapat menumbuhkan kerukunan antara pegawai dan pelaksana tugas di lapangan yakni petugas operasional kebersihan. Jika BPJS Kesehatan bisa langsung bekerjasama dengan dinas lingkungan hidup maka artinya petugas kesehatan baik itu dari Puskesmas ataupun Rumah Sakit yang berada di Purworejo bisa memberikan layanan kesehatan secara aktif jika dimintai bantuan oleh kepala DLHP. Perlu diketahui bahwa keselamatan dan kesehatan kerja saling menyatu dalam penerapan di dunia kerja, maka perlunya pemahaman yang jelas dari pegawai di lingkungan dinas dan petugas kebersihan agar tidak timbulnya kesalahpahaman memaknai arti kesejahteraan dan kesehatan. Resiko yang mungkin di dapatkan saat bekerja masih jarang ditemukan kecelakaan kerja, tetapi untuk pencegahan lebih mendalam dilakukan upaya preventif dan represif. Jaminan yang diberikan dapat menambah semangat kerja pekerja ditambah terjaminnya jaminan sosial yang diberikan oleh pemerintah melalui BPJS dan penangungan biaya santunan kecelakaan kerja dari bpjs ketenagakerjaan.

Langkah awal dalam mencoba menerapkan jaminan kesehatan dan mensejahterakan pekerja dengan mengadakan pemeriksaan secara rutin satu minggu sekali, juga memberikan sosialisasi pentingnya kesehatan dan keselamatan kerja agar mengurangi resiko dari kegiatan yang dilakukan saat bekerja di tempat-tempat umum untuk dijaga kebersihannya maupun di jalan raya. Jika kesehatan yang selalu diutamakan maka sangat mudah bagi petugas kebersihan menjalankan profesi dengan optimal dan tidak ada hambatan karena sakit. Sumber daya manusia adalah faktor utama yang jadi dasar pola pemikiran dari mengutamakan terkait kesehatan dan cara-cara dalam mengatasi kendala saat kerja. Selanjutnya di dalam keberhasilan manajemen resiko yang efektif sebagai wujud keberhasilan sistem organisasi ini. Tempat bekerja menjadi faktor kesehatan sangat mempengaruhi bagi setiap individu karna mereka setiap hari tanpa henti menjaga kebersihan lingkungan. Artinya kegiatan yang dilakukan dan lingkungan kerja berhubungan dengan kesehatan jika hal tersebut tidak diperhatikan dengan benar. Analisis dan kajian secara menyeluruh tertuju pada objek yang diteliti berpengaruh pada hasil akhir yang hendak dicapai dalam hal kesehatan terutama.

Mengadakan evaluasi setiap bulan juga perlu untuk memantau para pekerja dan pegawai DLHP purworejo, dengan tujuan untuk mengetahui hal-hal apa saja yang belum terlaksana dengan baik dan bagian mana yang harus ditingkatkan. Agenda seperti ini dilakukan bertepatan dengan program layanan kesehatan gratis jika diterapkan dengan rutin oleh dinas tersebut. Saling bahu membahu juga penting dengan harapan mencapai kesejahteraan bagi semua elemen masyarakat. Mengingatkan kebaikan dengan cara mengajak masyarakat membantu menjaga kebersihan lingkungan yakni untuk tidak membuang sampah sembarangan di tempat yang dilarang seperti pinggir jalan dan sungai, supaya menambah sadar betapa pentingnya kesehatan bagi semua pihak yaitu membuat poster di upload pada akun media sosial, portal berita dan diadakan kegiatan sosialisasi bagi masyarakat bertujuan lebih aktif mengingatkan pentingnya menjaga kebersihan lingkungan. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup mengatur bahwa hal yang dilarang dalam lingkungan hidup yang berkenaan dengan kesehatan adalah pencemaran dari lingkungan oleh aktivitas manusia yang secara sengaja mengabaikan kepentingan semua orang di bumi. Meningkatkan kualitas kesehatan yang memadai penting dilakukan dengan memperhatikan keadaan sekitar dan di mulai dari diri sendiri.

Selain membahas mengenai tata kelola lingkungan, dinas lingkungan juga mengatur mengenai perikanan di purworejo yang menjadi sumber utama penghasilan bagi nelayan. Masalah yang muncul biasanya di perairan baik itu laut atau pantai yaitu sampah yang dibuang oleh pengunjung atau sampah yang terbawa dari aliran muara sungai menuju laut. Kemudian dalam menyikapi kejadian itu harus ditindak tegas dan membenahi tempat wisata yang lebih ditambah penampungan sampah di area wisata tersebut. Faktor yang menjadi penentu keberhasilan pengelolaan sampah adalah peran aktif dari para masyarakat yang dibiasakan dengan hal kecil dari lingkungan rumah. Kesehatan dan kesejahteraan dapat digenggam menjadi satu kesatuan hasil yang hendak dicapai intansi dan masyarakat yang menunggu keberhasilan dari aturan kebijakan tentang sampah serta lingkungan yang bersih. Kemandirian suatu pengelolaan sebagai dasar penentuan kebijakan selanjutnya dengan melihat gambaran perkembangan setiap tahunnya. Partisipasi aktif dari semua pegawai dinas lingkungan, petugas kebersihan dan masyarakat dinanti-nantikan semua pihak untuk mendapatkan kenyamanan dan juga keamanan dari apa yang ada di sekitar. Sinergitas dan optimalisasi menjadi kunci utama terpenuhinya ragam aspek jaminan sosial, kesehatan, dan adanya kesejahteraan.

Pengamatan secara empiris dengan melihat fenomena sosial di lingkup kerja bisa langsung dicermati dan kemudian dikaji bagian-bagian yang masih kurang secara umum. Sistem pengelolaan sampah harus dioptimalkan karena kebersihan tercipta dari lingkungan yang terkelola dengan benar dan melihat gambaran nyata tentang arti dari kesehatan lebih penting daripada uang. Perda kabupaten purworejo nomor 3 tahun 2019: pengelolaan sampah menjelaskan penarikan retribusi untuk para individu, kelompok, dan pengusaha yang menghasilkan sampah dari adanya kegiatan yang berlangsung. Apabila ingin diambil sampahnya untuk diambil dan dibuang ke tempat pembuangan sampah akhir, upaya tersebut

harus diapresiasi karena berkat petugas kebersihan lingkungan dan tempat umum bersih tanpa adanya sampah yang menumpuk. Jadi, pada dasarnya sangat baik membantu meringankan pekerjaan petugas kebersihan dengan cara sederhana menata sampah agar dijadikan satu supaya proses pengangkutan sampah menjadi lebih cepat. Sehingga kesehatan dapat terjaga dengan baik dari tindakan masyarakat yang membantu pekerjaan petugas dalam mengelola sampah yang benar.

2. Penerapan Kebijakan Yang Tepat Sasaran Bagi Petugas Kebersihan Di Dalam Pemberian Jaminan Sosial Dan Tunjangan Hari Raya Yang Masih Menimbulkan Polemik Kesejahteraan Para Pekerja

Kebijakan yang adil dan dapat diterima pekerja menjadi cerminan terwujudnya pemerintahan yang baik dan dilandasi pada aturan hukum yang benar. Bukti tercapainya penerapan kebijakan dengan cara tidak ada komplain atau pendapat dari seorang maupun kelompok yang mengarah pada tindakan yang melanggar tata tertib, maka jika aturan maupun kebijakan yang ada lancar di terapkan di pemerintahan dan instansi terkait hal ini menjadi dasar keberhasilan secara kualitas dan juga kuantitas. Dalam memberikan upah, jaminan sosial, dan THR masih banyak kegelisahan yang dirasakan pekerja, yang mana tidak dirasakan keadilan dan mensejahterakan para pekerja yang telah bekerja secara totalitas serta tanggung jawab pada apa yang menjadi bagian tugasnya. Organisasi dan pekerja kebersihan dapat berjalan denganimbang jika semua pihak melaksanakan tugas dan peran secara efektif dengan melihat keadaan nyata di lapangan bukan hanya mengetahui dari adanya aduan semata dari beberapa pihak. Karenanya kesejahteraan belum sepenuhnya mampu mengentaskan permasalahan yang ada di bagian petugas kebersihan di Purworejo. Terkadang sistem kerja yang tidak sesuai dengan jam pergantian atau shift, selanjutnya perhitungan pemberian tunjangan hari raya menjadi berkurang karena pekerja kurang cermat memperhatikan pergantian jatah kerjanya.

Jaminan sosial banyak jenis dan manfaat yang dapat diperoleh untuk petugas kebersihan karena menjadi hak sebagai pekerja yang berkaitan dengan kesejahteraan harus diberikan secara utuh. Diatur dan dijelaskan dalam pasal 1 Undang-Undang No.11 tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial yaitu harus terpenuhinya kebutuhan secara material, spiritual, dan juga sosial bagi masyarakat. Kemudian dalam menjalankan program untuk kesejahteraan dan jaminan sosial dilakukan dengan sistematis, terarah, dan punya program berkelanjutan. Kaitannya dengan lembaga yang berwenang menjalankan kesejahteraan sosial itu dari instansi atau dinas tempat bekerja dalam hal ini adalah Dinas lingkungan hidup dan perikanan Purworejo yang telah memiliki izin resmi dan berbadan hukum. Cakupan yang sangat luas dari jaminan sosial maka harus diupayakan yang itu menjadi program unggulan dan mudah untuk diterapkan ke masyarakat. Dari lembaga-lembaga baik itu Pusat, Daerah Kabupaten atau Kota saling berhubungan dan diwajibkan menjalankan kegiatan sosial tersebut untuk masyarakat. Tempat mewadahi penyelenggaraan kesejahteraan sosial yaitu individu, kelompok, keluarga, dan masyarakat sebagai tertib umum membantu berjalannya kegiatan yang ada.

Dalam memberikan pokok upah dan tunjangan untuk hari raya tersebut harus dikomunikasikan melalui pegawai di dinas dan para pekerja yang menjadi komando untuk petugas kebersihan yang lain. Maka ditemukan hasil kebijakan yang mampu diterapkan secara langsung dan tidak ada perselisihan di dalamnya. Dasar aturan kebijakan tersebut harus satu padu menjadi penentu pemberian tunjangan hari raya bagi semua pekerja di dinas lingkungan karena diawasi dan dikelola pihak-pihak pegawai tersebut. Meningkatkan produktivitas kinerja pekerja dengan langkah menambah pemberian kompensasi pada saat lebaran dan dipenuhi atas jaminan kesejahteraan yang berhak didapatkan. Sehingga layak bagi mereka memperoleh gaji yang adil dan mampu mencukupi kebutuhan dasar keluarga dari uang yang diterima setelah bekerja dan menunggu waktu diberikan oleh pihak yang berwenang memberikan gaji. Pemberian jaminan sosial dan tunjangan saat hari raya menjadi dorongan kuat untuk mereka bekerja dengan lebih giat lagi kedepannya. Petugas kebersihan lebih termotivasi dan menghargai kebijakan yang diberikan yang mana telah sesuai dengan yang diinginkan untuk berhak diberikan ke mereka sebagai haknya. Aset yang membantu berjalan dengan lancar kebersihan lingkungan dan meningkatkan prestasi dari DLHP menuju kabupaten yang bersih dan sejahtera.

Hal yang penting dimengerti dan dipahami oleh pekerja adalah mempelajari secara matang isi dari Undang-Undang no.13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, sebab hal itu dapat membantu penguasaan hak dan kewajiban para pekerja. Kendala yang dihadapi petugas kebersihan yakni masih ada beberapa pekerja yang berpendidikan mimim, maka dalam menguasai sistem kerja yang benar serta memahami peraturan yang ada belum sepenuhnya diketahui kemudian di jalankan. Kendala yang ada itu menjadi kesempatan bagi pegawai dinas lingkungan untuk memberikan jaminan sosial dan tunjangan di hari raya tidak sesuai dengan yang seharusnya. Namun di sisi lain karena pekerja mengikuti perintah atasan menuntutnya harus menerima apa yang sudah diberikan kepadanya. Sangat penting bahwa sumber daya manusia lebih ditingkatkan karena mempengaruhi apa yang hendak dilakukan dan menjadi bagian dari haknya didapat secara utuh juga. Menanggapi hal tersebut lantas bagaimana solusi yang bisa dilakukan oleh dinas lingkungan menyoroti kejadian itu. Hanya pekerja yang bisa menjabarkan apa yang diinginkan untuk dipenuhi setelah bekerja dan bisa mendapatkan hak gaji secara penuh. Saling mengerti terkait kebutuhan kehidupan sehari-hari perlu dijalankan dan harus menggunakan perasaan atau empati terhadap pekerja yang menjadi tanggung jawab dinas lingkungan hidup dan perikanan.

Berdasarkan dari aturan SK Gubernur Jawa Tengah pada tanggal 30 November 2023, penetapan upah minimum kabupaten purworejo sebesar Rp 2.127.641. pada tahun sebelumnya pemerintah kabupaten purworejo mengajukan usulan terkait besaran upah minimum kabupaten sebesar Rp 2.076.769 atau dikatakan telah naik sebesar 1,61 persen dari adanya UMK di tahun 2023 yang mana sejumlah Rp 2.043.902. Maka dari gambaran tersebut dari pihak yang berwenang perlu menyatukan adanya kebijakan peraturan dan jangan sampai mengurangi besaran gaji tersebut karena sangat merugikan pekerja. Atas dasar kesejahteraan dan semangat dedikasi dalam bekerja harus diupayakan pihak yang berwenang memberikan gaji kepada petugas kebersihan sesuai besaran gaji yang sudah disahkan dan disepakati bersama. Mengedepankan kebaruan manajemen untuk pemerintahan dilandaskan dengan tindakan nyata, transparan, dan melihat bagaimana suatu sistem tata kelola antara pemangku kepentingan dengan seorang pekerja dapat berjalan dengan baik karena adanya kesinambungan di dalamnya. Tenaga kerja menjadi aset utama terselenggaranya kebijakan dan hasil yang bisa didapatkan berguna untuk mendukung tata kelola kebersihan lingkungan. Kewajiban pemerintah memberikan perlindungan terhadap para pekerja menjadi kunci utama terhadap upaya memberikan kesejahteraan dan kualitas manusia. Tidak bisa dicapai suatu hasil yang dalam waktu singkat tetapi ada tahapan yang harus dilakukan serta diberlakukan evaluasi secara menyeluruh di semua bidang baik di dinas lingkungan maupun petugas kebersihan.

Jaminan kehidupan yang layak diberikan oleh dinas yang menaungi pekerja karena sudah menjadi kewajiban melekat pada pihak-pihak yang harus disesuaikan undang-undang yang berlaku, baik itu dalam hal gaji, kesehatan, jaminan sosial, dan kesejahteraan. Jaminan keselamatan menjadi taruhan nyawa antara kerja dengan keadaan lingkungan karena hal tersebut sangat berpengaruh pada faktor keselamatan dari petugas kebersihan. Jika dibagian pantai atau perairan dikelola oleh orang yang bekerja sama dengan dinas lingkungan hidup dan perikanan yang mendaftarkan diri ingin membantu menjaga kebersihan pantai karena terdapat kegiatan yang dilakukan seperti tambak udang, ikan, dan kegiatan yang dilakukan oleh pengunjung saat berwisata. Memberdayakan secara optimal dari petugas kebersihan berarti harus mendukung segala hal-hal yang sudah sesuai dengan SOP dan perjanjian kerja, mencakup hak dan kewajiban yang didapat pekerja, dan aturan lain yang membahas pekerjaan dari DLHP dan para pekerja di dalamnya. Memberikan rasa aman dan memberikan kesejahteraan sangat diharapkan pekerja, terlebih lagi melihat beban kerja yang harus berkecimpung di tempat pembuangan sampah, dan sampah ataupun bisa di area pasar untuk mengambil sampah yang sudah dikumpulkan di tempat penampungan sampah untuk dibuang di tempat pemrosesan akhir di Jetis. Kepala dinas lingkungan hidup, Wiyoto mengatakan bahwa kabupaten purworejo mempunyai 1 TPA yakni TPA gunung tumpeng / TPA jetis, yang rata-rata per-hari menerima hasil kiriman sampah sebanyak 65 ton, antara lain dari bagian rumah tangga: 40 ton, dan Pasar: 25 ton.

Agar mengurangi jumlah kapasitas berlebih, pihak dari pengelola TPA mengelola sampah dengan berbagai metode antara lain membagi jenis sampah sesuai jenisnya dan berdasarkan

cara mengelolanya. Untuk sampah organik diolah dengan cara diberikan ke maggot yaitu hewan yang mengkonsumsi sampah untuk pakannya, selanjutnya sampah anorganik dipilih oleh pencari sampah untuk dijual kembali, dan sampah jenis kertas akan dihancurkan dengan mesin penghancur atau sentrator lalu dibakar dan cara tersebut digunakan dalam mengurangi jumlah sampah yang ada. Namun dari berbagai cara-cara yang dijelaskan di atas belum mampu mengurangi jumlah sampah yang dalam satu harinya mencapai puluhan ton. Harapannya masyarakat juga ikut mengurangi dan mengelola sampah di rumah dengan cara yang sederhana seperti memilah sampah berdasarkan jenisnya, sampah jenis plastik atau yang tidak mudah terurai di kumpulkan dan bisa dijual atau dijadikan ide-ide kreatif baik itu dari botol plastik atau kaca. Telah diterapkan juga 3R (reduce, reuse, dan recycle) selain itu juga sudah dipetakan berdasarkan jumlah volume sampah seperti tempat pembuangan sampah, bank sampah, dan unit masyarakat penjaga kebersihan. Setelah melihat gambaran nyata kerja dari petugas kebersihan serta masyarakat yang membantu menjaga kebersihan lingkungan, maka tentu harus diberikan gaji, jaminan sosial, dan kesejahteraan yang sebagaimana mestinya agar pekerja semangat dalam bekerja.

SIMPULAN

Optimalisasi pekerja dalam tatanan kesejahteraan sudah berjalan dengan baik, namun harus perlu dilakukan penyempurnaan di semua lini bagian mulai dari awal hingga evaluasi yang menyeluruh. Peraturan mengenai ketenagakerjaan juga harus dikaji lebih mendalam agar penerapan dan pasal-pasal yang ada mampu membantu semua pihak. Kemudian penyelenggaraan jaminan sosial, memberikan gaji, dan tunjangan hari raya menjadi salah satu hal yang penting serta dipertahankan apa yang sudah diterima pekerja, pihak-pihak yang memiliki kewenangan mengaturnya. Pengelolaan sampah yang ada di Purworejo sudah efisien dan kebersihan terjaga dari adanya pengaturan pengelolaan sampah yang dipilih sesuai dengan jenisnya. Maka upaya yang sudah dijalankan terus dikembangkan agar kinerja semua pihak di dinas lingkungan hidup terus menunjukkan peningkatan yang berkelanjutan. Kesehatan menjadi faktor penentu petugas kebersihan dalam melakukan kerjanya, jadi hal itu perlu diperhatikan oleh dinas lingkungan hidup dan perikanan yang menaungi mereka. Jika keseluruhan prosedur dan peraturan perundang-undangan sudah dijalankan dengan benar, membuat komponen tersebut bisa membawa perubahan yang bagus terhadap kesejahteraan dan jaminan sosial. Selain itu upaya masyarakat yang sudah membantu menjaga kebersihan sampah yang dihasilkan bisa diapresiasi secara penuh. Memenuhi hak dan kewajiban bagi pekerja memang membutuhkan upaya yang konsisten antara tindakan dengan mengaitkan pada aturan yang berlaku di dalamnya sebagai penentu arah kebijakan hukum.

Saat ditemukan gagasan baru mengenai sistem ketenagakerjaan bisa dijadikan aspirasi atau ide sebagai tumpuan dalam mengembangkan kinerja semua pihak baik itu petugas kebersihan atau pegawai dinas lingkungan hidup dan perikanan. Peranan aktif dari dinas sendiri sangat diperlukan dan boleh dilakukan untuk memberikan arahan, motivasi dan sosialisasi para pekerjanya ataupun bisa juga kepada masyarakat yang diharapkan lebih mengerti akan pengelolaan sampah bukan hanya menghasilkan sampah tapi juga harus mampu menjaga kebersihan di lingkungannya. Harapan di masa mendatang peran pemerintah daerah, pemerintah pusat bisa memberikan inovasi terkait penanganan sampah kemudian diolah untuk mengurangi sampah di tempat penampungan akhir sampah. Di sisi lain terkait kebijakan yang transparan pasti sudah bisa dirasakan oleh masyarakat salah satunya adanya gerakan 3R yang sudah disosialisasikan ke berbagai media seperti media sosial dan media saluran televisi. Menjaga kebersihan lingkungan, tempat umum, dan pasar harus dilibatkan partisipasi dari masyarakat sebagai komponen membantu penanganan sampah agar lebih mudah diambil oleh petugas kebersihan.

DAFTAR PUSTAKA

- Peraturan Perundang-undangan
- Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Jakarta
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial

Perda Kabupaten Purworejo Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sampah
Jurnal

- Alex s. nitisemito. 2001. Wawasan sumber daya manusia. Jakarta: pustaka utama grafiti.
- Arikunto, & Suharsimi. 2014. Prosedur penelitian suatu pendekatan praktik. Jakarta: rineka cipta.
- Andriani & Tiara, peran pedagang pasar dalam pengelolaan sampah di lingkungan pasar ciputat. Skripsi. Jakarta: fakultas ilmu Tarbiyah dan Keguruan, UIN Syarif Hidayatullah.
- Chandra, Budiman. 2006. Pengantar kesehatan lingkungan. Jakarta: EGC.
- Handoko, H.2002. manajemen personalia dan sumber daya manusia. Jakarta: BPFE.
- Nulla, Yusuf Mohamed. 2013. A Combined Study of Canada's Top CEO Compensation Sectors - Energy, Metal, & Mining - An Empirical Study. Strategic Management Quarterly, 1, pp 11-22.
- Pohan, D. 2023. Pengaruh lingkungan kerja, gaya kepemimpinan dan disiplin kerja terhadap kinerja pegawai. Jurnal bisnis mahasiswa, 3, 77-92.
- Supriyadi. 2010. Pengaruh keselamatan kerja terhadap kinerja karyawan pada CV. Sriwijaya utama di Bandar lampung. Jurnal Sains dan Inovasi, Hal: 15-21
- T. A., & Sudarwati. 2014. Pengaruh kompensasi dan penghargaan terhadap motivasi kerja karyawan. Sragen: PT KAI.